



LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

2023



KATA PENGANTAR

Pengendalian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan pengendalian risiko Biro PBJ Setda Prov. Kalbar. Pengendalian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam mencapai indikator kinerja utama (IKU) Biro PBJ Setda Prov. Kalbar.

Dengan telah disusunnya laporan pengendalian Risiko ini, maka dapat dilihat gambaran risiko yang dihadapi Biro PBJ Setda Prov. Kalbar dalam mencapai tujuan/sasaran penetapan kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan laporan di masa mendatang. Akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Januari 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,



Drs. ASWIN KHATIB, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681213 199010 1 00

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi dampak risiko negatif dan memaksimalkan peluang positif. Manajemen risiko tidak hanya berlaku untuk proyek-proyek bisnis tetapi juga relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengambilan keputusan finansial atau pengelolaan karir. Dengan memahami dan mengelola risiko dengan baik, sebuah organisasi atau individu dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi potensi kerugian.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar berkomitmen untuk mengendalikan risiko untuk mencapai indeks tata Kelola pengadaan barang/jasa pemerintah dan salah satu upaya dalam mencapai hal tersebut adalah dengan mengelola risiko secara lebih baik. Disamping hal itu, pengelolaan risiko juga berkontribusi dalam membantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar mencapai, visi, misi, renstra serta membantu efektifitas pencapaian sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya laporan adalah sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen Risiko itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan manajemen risiko ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal;
2. Untuk memeringkat risiko-risiko yang muncul berdasarkan kebutuhan untuk segera mendapat penanganan;
3. Untuk meyakinkan instansi bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk dikelola secara efektif.

BAB II PENILAIAN RISIKO

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian resiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis resiko, guna menghasilkan output yang yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Penilaian resiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan resiko (yang meliputi identifikasi dna analisis resiko) serta sistem pengendalian intern dengan tujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh resiko potensial
- b. Memeringkat resiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas agar dapat dikelola secara efektif

Pelaksanaan proses penilaian resiko dalam 2 tahap kegiatan yang terdiri dari:

1. Identifikasi resiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu daftar sumber-sumber resiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan tujuan.
2. Analisis resiko bertujuan untuk memisahkan resiko kecil yang dapat diterima dari resiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan resiko. Analisis resiko meliputi penentuan sumber resiko, kemungkinan dan dampak resiko yang akan terjadi.

Identifikasi Resiko Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar dapat dilihat pada table di bawah ini :

IDENTIFIKASI RESIKO OPERASIONAL BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV. KALBAR

Nama Pemda		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat									
Nama OPD		Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat									
Tahun Penilaian		2022									
Periode yang dinilai		2023									
Tujuan Strategis		Terwujudnya efektivitas tata Kelola pemerintahan daerah									
Sasaran Strategis OPD		Terwujudnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)									
Urusan Pemerintahan		Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan									
No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Tepat Waktu	Perencanaan dan Pelaksanaan	Tidak tercapainya target pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu		Kepala Bagian	Masih belum optimalnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan oleh para pelaku pengadaan	Eksternal dan Internal	UC	Berpengaruh pada pencapaian target serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalbar	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait

	1. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Perencanaan	1. Informasi rencana jadwal yang tersaji dalam paket RUP yang diumumkan PA/KPA tidak benar (tidak mencerminkan rencana pelaksanaan yang sebenarnya) 2. Lambannya aktivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun anggaran	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	1. Belum dilakukan verifikasi/review terhadap RUP Perangkat Daerah 2. Belum tersedia hasil rumusan strategi kebijakan yang berorientasi pada percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Eksternal	C	1. Menumpuknya penyampaian paket pengadaan barang/jasa dalam periode waktu tertentu 2. Ketidaktertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait
	2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	1. Pokja Pemilihan mengalami kelebihan beban paket pengadaan berjalan 2. Pokja Pemilihan tidak leluasa dalam mereview, menetapkan durasi jadwal pemilihan, menyusun dokumen pemilihan, hingga mengevaluasi penawaran peserta	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	1. Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Pokja Pemilihan sesuai perhitungan beban kerja 2. Keterlambatan PPK dalam menyampaikan dokumen persiapan pengadaan	Internal	C	1. Proses pelayanan pemilihan penyedia berlangsung lebih panjang dari SOP yang ditetapkan 2. Kegagalan proses pemilihan penyedia barang/jasa	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait
	3. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	1. Penyajian data belum optimal 2. Perencanaan pengadaan tidak akurat/tepat	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	1. Format data/penyajian data informasi yang belum dibakukan dalam pengumpulan data pengadaan barang/jasa 2. Pengentrian di RUP tidak benar dan OPD tidak tertib waktu dalam mengumumkan RUP agar dapat mencapai 100%	Internal	C	1. Hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan tidak dapat memberikan bahan pertimbangan/saran yang tepat bagi perumusan strategi pengadaan dimasa mendatang 2. Pelaksanaan PBJ tidak tepat waktu	Biro PBJ
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Realisasi Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan	Rencana RUP dan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pada Aplikasi SPSE tidak diinput / tidak lengkap	RSO.22.99.02.02	Kepala Bagian	Belanja Operasional dan Belanja Modal yang seluruhnya harus diinput pada Aplikasi SPSE	Eksternal	C	Rendahnya Nilai Rapor Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalbar secara Nasional	Pemerintah Daerah/ Biro PBJ

	1.	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksanaan	Rendahnya Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di SPSE	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	Tiket yang di Eskalasi Ke Admin LKPP Tidak Ditindaklanjuti	Eksternal	UC	Beberapa Permasalahan Teknis yang menyangkut Aplikasi SPSE tidak dapat diselesaikan	Biro PBJ									
	2.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Aplikasi pendukung belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	Kebutuhan Fungsi Aplikasi Yang Dinamis	Internal	C	Pemanfaatan Aplikasi Pendukung tidak Optimal	Biro PBJ									
	3.	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Terbatasnya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dipublikasi	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	Belum semua Pengadaan barang/jasa yang melalui SPSE	Internal	C	Tidak dapat mempublikasikan seluruh Pengadaan Barang dan Jasa	Biro PBJ									
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah UKPBJ yang dilakukan Pembinaan	Pelaksanaan	Upaya Meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ Kab/Kota Menjadi Level 3 (Pro Aktif) tidak tercapai	RSO.22.99.02.02	Kepala Bagian	UKPBJ Kab/Kota belum dapat memenuhi 9 variabel tingkat kematangan	Eksternal	UC	masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan tingkat kematangan UKPBJ menjadi level 3 (pro aktif)	Biro PBJ dan UKPBJKab/Kota										
												Jumlah Kompetensi SDM PBJ dan Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	Pelaksanaan	Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Tidak Tercapai	RSO.22.99.02.02	Kepala Bagian	Data kebutuhan pengembangan kompetensi SDM Pengadaan belum terinventarisir dengan baik	Internal	C	SDM Pengadaan mengalami hambatan dalam pengembangan kompetensi dan karirnya	Biro PBJ
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Pengembangan Kompetensi Pengelola pengadaan barang dan jasa tidak maksimal	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	Belum terinventarisir data terkait kebutuhan pengembangan kompetensi pengelola pengadaan barang dan jasa	Eksternal	C	Tidak optimalnya pengadaan barang dan jasa	Biro PBJ dan Perangkat Daerah Terkait										

	2. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Level 3 Center Of Excellence Kab/Kota tidak tercapai	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	UKPBJ Kab/Kota belum dapat memenuhi 4 domain dan 9 variabel tingkat kematangan	Eksternal	UC	UKPBJ Kab/Kota tidak bisa menjadi Center Of Excellence level 3 dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang pro aktif	Biro PBJ dan UKPBJ Terkait
	3. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa OPD tidak maksimal	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	belum terinventarisir data terkait kebutuhan pengembangan kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa OPD	Internal	C	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak optimal	Biro PBJ dan OPD
Pelaksanaan			terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	RSO.22.99.02.02	Kasubbag	terbatasnya SDM dalam pendampingan pengadaan barang dan jasa	Internal	C	tidak optimalnya seluruh rangkaian pengadaan barang dan jasa	Biro PBJ dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa perangkat daerah	

Keterangan :

Contoh Kode Risiko :

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/PD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/PD	Kode
RSP	23	1	1	1	RSP.23.01.01.01
RSO	23	2	5	1	RSO.23.02.05.01
ROO	23	3	25	1	ROO.23.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut :

- RSP : Strategis Pemda
- RSO : Strategis Perangkat Daerah
- ROO : Operasional Perangkat Daerah

Contoh Kode Risiko :

RSO.22.99.02.02

- RSO = kode jenis risiko utk risiko strategis OPD
- 22 = tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2022
- 99 = kode urusan wajib/pilihan sesuai contoh 01 urusan lainnya
- 02 = kode pemda/entitas yang menilai
- 02 = nomor urut risiko

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Laporan hasil identifikasi dan analisi resiko kegiatan Biro PBJ Setda Prov. Kalbar ini memuat hasil kegiatan yang berjalan, hasil identifikasi resiko kegiatan, dampak resiko, analisis resiko, serta status resiko yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilaksanakan. Laporan yang disusun dan dilaksanakan tersebut berpedoman dan bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro PBJ Setda Prov. Kalbar.

B. SARAN

Untuk sarannya, bagi pimpinan untuk segera memfeedback hasil kegiatan evaluasi agar ada perbaikan dalam proses perjalanan kegiatan.

Pontianak, Januari 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,



Drs. ASWIN KHATIB, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681213 199010 1 001